



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUDARSO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 504291

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.175.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 754 m2/240 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/40 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 12690 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 1777 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 243.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 239.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 309.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 11.479.454**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 8.600.000**



Sub Total	Rp.	1.747.579.454
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.747.579.454

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.